

PENGUATAN IMPLEMENTASI SAKIP INSTANSI UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

PENDAHULUAN

Good Governance merupakan cita-cita setiap penyelenggaraan negara di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara sederhana, *good governance* dapat diartikan sebagai prinsip pemerintahan yang menghasilkan pelayanan publik efisien, dapat diandalkan, dan administrasinya dapat dipertanggungjawabkan pada publik.

RINGKASAN EKSEKUTIF

- SAKIP berperan sebagai pelaksana asas akuntabilitas yang menekankan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam periode tertentu.
- Penerapan SAKIP sejalan dan konsisten dengan penerapan *good governance* yang berorientasi pada pencapaian *outcomes*.
- Permasalahan terkait kurangnya komitmen, regulasi, sosialisasi, dan belum terintegrasinya SAKIP dengan sistem perencanaan nasional menunjukkan masih lemahnya implementasi SAKIP pada sebagian besar instansi.
- Komitmen dari setiap pimpinan serta dukungan dari pegawai di setiap lini sangat penting dalam melaksanakan SAKIP sebagai alat pertanggungjawaban dan alat pengendalian kinerja.
- Revisi Renstra diarahkan pada upaya menyelaraskan kinerja sesuai tugas pokok seluruh unit kerja dengan memperbaiki sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Penulis : Christopher Juan
Penanggungjawab : Joko Subakti
Redaktur : Katherin
Editor : Haryanah
Editor Bagian : Azmi Listya Anisah
Ardy Firman Syah
Diana Marifah
Design Grafis : Mochammad Ervin Permana
Sekretariat : Ritauli Renyati
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan
Jakarta Timur
Telp : 021-80887011
e-mail : ppm.asn@bkn.go.id

Salah satu karakteristik *good governance* adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Reformasi Birokrasi menjadi bagian upaya Pemerintah untuk mencapai *good governance* dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sehingga pelayanan publik yang memuaskan kepada masyarakat dapat tercipta. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik adalah penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mempunyai peran vital dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencapai *good governance*.

SAKIP berperan sebagai pelaksana asas akuntabilitas yang menekankan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Sebagaimana asas akuntabilitas itu sendiri menjadi salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang termuat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

DESKRIPSI MASALAH

BENTUK PELAKSANAAN MANAJEMEN KINERJA MELALUI IMPLEMENTASI SAKIP

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban

program setiap instansi terlaksana melalui kebijakan SAKIP yang menjadi upaya strategis Penyelenggara Negara dalam mencapai masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

SAKIP menjadi bentuk penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang berorientasi pada pencapaian *outcomes*, pelaksanaannya tetap bermuara pada tujuan yang sama yaitu agar instansi dapat meningkatkan performa dan lebih berorientasi pada hasil.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja menjadi metode pengukuran yang memuat perbandingan antara rencana kinerja dengan capaian masing-masing indikator sasaran maupun kinerja kegiatan.

4. Pengelolaan data kinerja

Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, melaporkan data kinerja, dan mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik kinerja.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SAKIP



Gambar 1 Alur teknis Pelaksanaan SAKIP pada Instansi

SAKIP wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan beberapa butir tahapan penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis menjadi langkah pertama implementasi SAKIP yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan mempunyai indikator yang jelas untuk mencapainya. Setiap instansi wajib menyusun rencana strategis sebagai dokumen periode lima tahunan.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja berperan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis melalui berbagai kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja *input*, *output*, *benefit* dan *impact* beserta tingkat pencapaiannya.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk menyajikan informasi terkait pencapaian setiap tujuan, sasaran dan realisasi organisasi yang sudah ditentukan sesuai dengan yang termuat dalam Rencana Strategis yang sudah ditetapkan dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja antara tahun berjalan dengan beberapa tahun belakangan dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian dari realisasi setiap indikator kinerja kegiatan, kemajuan hingga kendala yang dilalui dalam mencapai visi dan misi agar dapat dinilai dan dipelajari untuk memperbaiki kinerja dalam pelaksanaan program/kinerja yang akan datang.

Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP bersandar pada *output* SAKIP yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

PERMASALAHAN IMPLEMENTASI SAKIP INSTANSI

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dari KemenPAN-RB, terdapat beberapa hal yang menunjukkan masih lemahnya implementasi SAKIP pada sebagian besar instansi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya;



Gambar 2 Stakeholder yang terlibat dalam Pelaksanaan Evaluasi AKIP

Sumber: Website Menpan RB

LAKIP menjadi laporan akhir yang menggambarkan kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP menghasilkan Nilai SAKIP instansi melalui Laporan Hasil Evaluasi. Nilai tersebut menggambarkan tingkatan akuntabilitas kinerja instansi sehingga dapat mencerminkan kemampuan instansi dalam mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh atas penggunaan uang negara.

Evaluasi SAKIP secara umum dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan SAKIP mendorong peningkatan pencapaian target kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil di setiap instansi pemerintah. Hasil evaluasi SAKIP dijadikan sebagai acuan perkembangan implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan dan berfungsi sebagai panduan bagi pembuat kebijakan untuk menganalisis berbagai kendala pelaksanaan reformasi birokrasi hingga mencari solusi terbaik dalam mengatasi kendala tersebut.

1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar. Komitmen organisasi sangatlah penting untuk mendorong kontribusi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kinerja, seperti implementasi SAKIP sebagai wujud pelaksanaan asas akuntabilitas instansi.
2. Regulasi pelaksanaan akuntabilitas terhadap manajemen kinerja masih kurang kuat. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya penerapan akuntabilitas kinerja yang dapat menghambat terwujudnya *Good Governance* setiap instansi.
3. Belum tersosialisasikannya kebijakan di bidang akuntabilitas pada seluruh instansi disebabkan karena masih terdapat keterbatasan kapabilitas SDM pada bidang akuntabilitas kinerja.
4. Belum terintegrasikannya SAKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran yang menyebabkan kurang akuratnya data SAKIP sehingga berdampak pada terganggunya akuntabilitas LAKIP.

UPAYA PENINGKATAN IMPLEMENTASI SAKIP INSTANSI

Mengingat terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi kendala bagi instansi pemerintah dalam menerapkan SAKIP secara tidak langsung juga menghambat pelayanan publik kepada masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan instansi pemerintah dalam rangka penguatan penerapan SAKIP meliputi:

1. Pimpinan harus memahami kinerja yang akan diwujudkan dalam instansi, serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja, secara berkala dilakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja, Evaluasi ini dilakukan terhadap indikator kinerja seluruh unit kerja agar lebih *relevan*. Dalam mengimplementasikan tujuan organisasi, adanya penguatan kerjasama dan komitmen yang kuat di setiap unit kerja untuk bersinergi dalam menerapkan SAKIP.
2. Mendorong penyusunan peraturan hukum yang mengatur mengenai akuntabilitas kinerja untuk memenuhi unsur kepastian hukum serta memperkuat eksistensi penerapan akuntabilitas kinerja terhadap setiap instansi.
3. Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja instansi yang kurang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta menetapkan indikator kinerja baru yang lebih menggambarkan hasil dan terukur.
4. Meningkatkan kualitas rencana strategis (Renstra) bagi masing-masing instansi yang diarahkan pada upaya untuk mencerminkan kinerja yang selaras dengan tugas pokok. Renstra yang sudah ditetapkan dapat membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
5. Setiap instansi diharapkan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap implementasi SAKIP yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi SAKIP.
6. Mendorong pengembangan model percontohan *Island of Integrity* yaitu suatu pemerintah daerah/wilayah yang dijadikan model penerapan prinsip *good governance* sehingga wilayah tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta dapat dijadikan *pilot project* bagi instansi lainnya.

PENUTUP

Penguatan Implementasi SAKIP penting dalam mewujudkan *good governance* terhadap seluruh instansi pemerintah yang berperan sebagai penyedia layanan publik kepada masyarakat. Perlu komitmen yang kuat dari setiap pimpinan dalam memaksimalkan implementasi SAKIP kepada jajaran setiap unit kerja, direktorat, kedeputian hingga instansi. *Good Governance* yang tercapai dengan baik harapannya dapat mengakselerasi terwujudnya birokrasi kelas dunia yang mampu menumbuhkan iklim investasi, menciptakan lapangan kerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam menghantarkan Indonesia menjadi negara maju.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Adanya penerapan indikator kinerja yang terukur dalam mendukung pencapaian kinerja unit.
- Pengembangan model percontohan *Island of Integrity* yang dapat dijadikan sebagai *pilot project* bagi instansi lainnya untuk memperkuat implementasi SAKIP.
- Hasil evaluasi SAKIP dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merevisi atau merombak kebijakan yang kurang tepat terhadap pelaksanaan fungsi masing-masing instansi pemerintah.
- Sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap implementasi SAKIP bagi setiap instansi secara konsisten dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Humas Menpan RB. 2020. Implementasi SAKIP untuk Kepentingan Masyarakat. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/implementasi-sakip-untuk-kepentingan-masyarakat> (diakses pada 28 April 2023 pukul 10.44)
- Wisnu. 2022. Peran SAKIP Penting Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. (Online). <https://www.uny.ac.id/id/berita/peran-sakip-penting-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan> (diakses pada 2 Mei 2023 pukul 13.50)
- Wiwik Andriani, Irda Rosita, Hidayatul Ihsan. 2015. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol 10. No. 2 Desember 2015. ISSN 1858-3687 Hal.51-60